

Collaborative Governance: Tata Kelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam Kota Pangkal Pinang

Krisnawati Krisnawati^{1*}

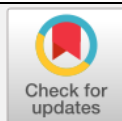
¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Jakarta-Indonesia

*Korespondensi: krisnawatikrisnawati81@gmail.com

INFO ARTIKEL

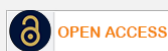
Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

30 Agustus 2022



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2022 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Krisnawati, K. (2022). Tata Kelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam Kota Pangkal Pinang. *Journal of Politics and Democracy*, 2(1), 24-32.

<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i1.34>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi antara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada pengelolaan sampah di TPA Parit Enam Kelurahan Bacang kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Collaborative Governance dari Anshel dan Gash. Hasil dari penelitian ini adalah Collaborative Governance pada kemitraan antara Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada pengelolaan sampah di TPA Parit Enam dianggap efektif. Ini dibuktikan oleh pihak DLH yang mampu memenuhi standar program kerja yang diajukan PLTU. Selain itu, adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait juga diharapkan tidak mendapat kendala apapun. Sinergi antara PLTU, DLH dan pengelola TPA serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang.

This study aims to analyze the Collaborative Governance process and the factors that influence the collaborative governance between the Steam Power Plant (PLTU), the Environmental Dervice (DLH) and the Final Disposal Manager (TPA) in waste management at TPA Parit Enam Bacang Village Bukit sub-district Pangkalpinang City Diamond. In collecting data, this research uses descriptive qualitative research methods with a case

study approach, namely by observation, interviews and documentation. The theory used in this research is collaborative governance theory from Anshel and Gash. The results of this study are that collaborative governance in the partnership between the Steam Power Plant (PLTU) and the Environmental Service (DLH) in waste management at TPA Parit six is considered effective. This was proven by the DLH being able to meet the work program standards proposed by the PLTU. In addition, there is good communication between the two parties, it is hoped that supervision carried out by related parties will not encounter any obstacles. The synergy between PLTU, DLH and TPA managers and the community is the key to successful waste management in Pangkalpinang City.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

1. Pendahuluan

Reformasi merupakan salah satu perkembangan politik di Indonesia yang menekan banyak perubahan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan otonomi daerah. Otonomi daerah berimplikasi bahwa pemerintah daerah harus dapat menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di setiap daerah. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kewenangan dalam mengatur urusan publik, tetapi juga membaginya dengan pihak lain yang dikenal sebagai konsep good governance (Basuki, 2006). Fokus dan orientasi pemerintah lokal (good government) dalam memberikan pelayanan umum (public service) di daerah masing-masing. Bentuk pelayanan umum yang diberikan pemerintah daerah dapat berupa pelayanan jasa dan pelayanan administratif. Salah satu bentuk pelayanan jasa dan pelayanan perkotaan adalah kebersihan dan penanganan pengelolaan sampah. Mengingat bahwa pengelolaan sampah merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda karena semakin menunjukkan titik kritis. Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat turut mempengaruhi bertambahnya volume sampah (Marshall & Farahbakhsh, 2013). Perumbuhan dan kepadatan penduduk disuatu daerah/ kota memunculkan masalah tersendiri. Salah satu kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk adalah Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang merupakan pusat kota yang ada di daerah Bangka Belitung yang memiliki tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi dengan latar belakang masyarakat asli maupun masyarakat pendatang dari luar pulau Bangka Belitung. Tidak hanya dari segi pertumbuhan penduduk namun juga dari segi perekonomian dan perkembangan sosial lainnya. Adanya pertumbuhan perekonomian yang tinggi menuntut adanya infrastruktur yang mendukung serta memadai untuk menopang tingginya kemajuan dan investasi Kota Pangkalpinang. Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki beberapa rancangan proyek salah satu proyek adalah tentang pengelolaan sampah yang menjadi hal penting untuk ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah kota salah satunya permasalahan sampah yang sampai saat ini belum maksimal dalam mengelola sampah secara terpadu. Penanganan sampah menjadi hal penting mengingat banyaknya penyebab timbulnya permasalahan sampah seperti tingginya

volume sampah yang dihasilkan baik oleh industri maupun sampah dari masyarakat yang banyak dijumpai serta terbatasnya lahan tempat pembuangan akhir (TPA) yang tersedia menjadi masalah yang ada dalam pengelolaan TPA.

Wilayah yang perlu penanganan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam Kelurahan Bacang Kecamatan bukit Intan Kota Pangkalpinang. Pengelolaan sampah di TPA Parit Enam masih bersifat konvensional yaitu dengan teknik pengumpulan, pengangkutan dan kemudian di buang ke TPA Parit Enam dengan menggunakan sistem open dumping (pada sistem terbuka sampah dibuang begitu saja dalam tempat pembuangan akhir tanpa ada penutupan tanah). Tidak hanya masih menggunakan sistem open dumping namun TPA ini masih memiliki keterbatasan dalam hal lahan pembuangan sampah sehingga TPA mengalami overload dalam menampung sampah sehingga terjadi tumpukan sampah yang cukup banyak. Penyebab lainnya yang mungkin terkait dengan masalah sampah adalah kurang optimalnya pemerintah beserta stakeholder lainnya dalam mengimplementasikan setiap kebijakn dan strategi terkait dengan pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Masalah sampah tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan yang cukup serius tidak hanya dari pemerintah saja namun juga membutuhkan kemitraan/ kolaborasi dengan pihak negara atau pihak lainnya yang dapat berkontribusi dalam mengelola sampah di TPA.

Permasalahan pengelolaan sampah di TPA Parit Enam menarik perhatian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penanggung jawab TPA Parit Enam. Tujuan PLTU melaksanakan kolaborasi dengan DLH adalah untuk mengelola sampah di TPA Parit Enam agar pengelolaan sampah dapat terkelola dengan berwawasan lingkungan serta menambah pendapatan daerah. TPA Parit Enam dipilih dalam proses kolabroasi adalah jarak angkut dari PLTU dan TPA yang dekat serta TPA Parit Enam merupakan satu-satunya TPA terbesar yang ada di Kota Pangkalpinang dengan jumlah timbulan sampah yang cukup tinggi yaitu 150 ton perhari. Program kerja sama pada pengelolaan sampah ini adalah program pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP) untuk dijadikan bahan baku co-firing (Pangkalpinangkota.go.id).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fenomena dan peristiwa. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok ([Rahman & Ibrahim, 2009](#)). Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dapat menganalisa hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi serta berbagai hal dalam memecahkan suatu masalah yang ada dilapangan. Maka dari itu pentingnya dilakukan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian agar dapat memperoleh jenis data yang benar dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder ([Ibrahim, 2015](#)).

Data primer didapatkan dari wawancara mendalam terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam dan untuk data sekunder didapatkan dari buku referensi, jurnal, media online, dan skripsi serta sumber internet yang relevan dengan fokus masalah yang dikaji dalam collaborative governance pada pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit

Enam Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Lokasi penelitian dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi serta pengumpulan data-data terkait penelitian. Dalam menentukan subyek dan penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria informan yang dianggap paling tau informasi yang di harapkan. Teknik analisis data menggunakan 3 variabel yaitu: Reduksi data, Display data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang diperankan atau dimaninkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut *Terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh kedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang didefinisikan adalah "*person task or duty in undertaking*" artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan sedangkan peranan meruakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014). Pada penjelasan tentang peran maka dapat dijelaskan peran dalam *collaborative governance* studi pada pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.

Diawali dengan dengan peran PLTU dalam kolaborasi/ kemitraan pada pengelolaan sampah adalah menyiapkan bangunan dan teknologi pengelolaan biodrying, menyiapkan mesin, produksi dan peralatan lainnya selama masa penelitian berlangsung, melakukan pengujian Bahan Bakar Jumptan Padat (BBJP) di laboratorium PLN, memanfaatkan produk hasil penelitian berupa BBJP untuk pengujian *co-firing* di PLTU yang dikelola PLTU, menanggung seluruh biaya operasional harian (Operator, tenaga harian, listrik dan *bioaktivator*) selama masa penelitian, menyediakan pengawasan lapangan dan tim mutu, membuat hasil laporan penelitian pengelolaan BBJP dan evaluasi pekerjaan *Project* segi teknis dan non teknis. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ramlan Gurning selaku *Manager Engineering* PLTU:

"setelah fase pilot project selesai, PLN akan menyerahkan asset BBJP Plant kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku penanggung jawab TPA Parit Enam. Untuk biaya operasional selanjutnya akan menjadi tanggung jawab DLH dan Pengelola TPA. Namun PLN dan PLTU tetap akan member pendampingan dilapangan dan hasil produksi BBJP dari pengelolaan sampah nantinya akan dibeli oleh PLTU sesuai dengan Perdir 004.P/DIR/2022" (Wawancara 14 September 2022).

Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam kolaborasi/kemitraan adalah penyediaan lahan minimal 500 m², penyediaan sampah ke tempat Pilot Project, penyediaan transportasi sampah sisa pemilahan dari *Pilot Project Plant* kembali ke TPA, Membuat laporan operasional operator tenaga harian. Berikut hasil wawancara peneliti kepada Rizky selaku staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang.

"Pada kemitraan yang dilaksanakan antara pihak PLTU dan DLH saling terkait karena kerja sama ini sudah direncanakan sejak lama oleh pihak PLTU dan DLH sebagai pihak penanggung jawab dan pengelola pihak TPA sangat mendukung pada kerja sama ini karena dapat membantu pemerintah dan DLH dalam pengelolaan sampah di TPA Parit Enam sehingga dapat bernilai ekonomis dan diharapkan dengan adanya kolaborasi dan kerja sama ini dapat berlangsung secara

berkelanjutan tidak hanya di masa sekarang namun juga di masa depan”(Wawancara 19 September 2022).

a. Starting Condition (Kondisi Awal)

Kota Pangkalpinang adalah ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai wilayah seluruhnya 118,40 km² (berdasarkan PP No. 7 Tahun 2007). Kondisi topografi Kota Pangkalpinang pada umumnya berbukit dan bergelombang dengan ketinggian 20-50 dari permukaan laut. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya dampak negatif yaitu wilayah yang rawan banjir terutama saat musim hujan atau pengaruh surut air laut. Pada hal ini salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pangkalpinang khususnya pada permasalahan sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam yang merupakan TPA terbesar di Kota Pangkalpinang. Masalah yang muncul adalah keterbatasan daya tampung TPA berdasarkan volume sampah yang dihasilkan setiap hari dan tidak adanya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menjadi permasalahan TPA. Pada proses pembuangan sampah di TPA menggunakan sistem *Open Dumping* (Sistem kumpul, angkut, buang) yang sepenuhnya dibuang langsung ke TPA Parit Enam. Permasalahan lain juga terkait pengelolaan sampah yang belum terintegrasi dengan baik dari satu tahap ke tahap lainnya seperti tempat sampah dan pemilahan sampah yang belum sesuai dengan pengelompokan sampah sehingga terjadi ketidakefektifan pada TPA Parit Enam dan kurang optimal pemerintah serta *stakeholder* yang terkait dalam mengimplementasikan setiap kebijakan dalam penanganan dan pengelolaan sampah.

b. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

Latar belakang terbentuknya *collaboration process* dari kemitraan antara pihak PLTU dan DLH Kota Pangkalpinang adalah karena permasalahan pengelolaan sampah yang menimbulkan jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Parit Enam sangat tinggi dan menyebabkan TPS mengalami *overload* dan jumlah timbulan sampah yang semakin hari semakin meningkat dan akhirnya membawa dampak negatif pada TPA Parit Enam. Permasalahan pengelolaan sampah di TPA Parit Enam menarik perhatian Pemabngkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk melakukan kolaborasi atau kemitraan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penanggung jawab pengelola TPA Parit Enam. Program kolaborasi menjadi salah satu langkah untuk membaca garis batas yang dapat menghasilkan kejelasan pemerintah dengan tujuan publik dalam pengelolaan sampah mengingat permasalahan menjadi masalah penting yang ada di publik dan harus segera diatasi. Selain itu jarak PLTU air anyir yang dekat dengan lokasi TPA Parit Enam memudahkan pada proses pengangkutan sampah yang nanti akan dikelola. Terdapat 4 proses kolaborasi pada *collaborative governance* tentang pengelolaan sampah di TPA Parit Enam. Proses kolaborasi tersebut yaitu *face to face*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding*, *intermediate outcome*.

1. Dialog antar muka (*Face to face*)

Proses kolaborasi diawali dari *face to face* dialog atau pertemuan tatap muka adalah pertemuan yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi dalam hal ini PLTU dan DLH dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut dalam membahas tujuan untuk kepentingan bersama. Dialog yang dilakukan antara pihak PLTU dan DLH Kota Pangkalpinang secara langsung sudah terstruktur baik. Menurut hasil di lapangan

bentuk *face to face* yang dilakukan oleh PLTU dan DLH setelah melakukan audiensi dilanjutkan dengan melakukan diskusi untuk menawarkan kerja sama kepada pemerintah Kota khususnya DLH sebagai penanggung jawab dan pengelola TPA Parit Enam kemudian ada instansi pendukung dari diskusi tersebut seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), Badan Keuangan Daerah (BAKUDA), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan kelompok swadaya masyarakat. Dalam proses tersebut tidak hanya berlangsung satu arah melainkan dua arah karena saling berinteraksi, tujuan dari adanya pertemuan tersebut adalah agar kemitraan dalam pengelolaan sampah dapat terjalin dengan baik.

2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Proses *Trust Building* atau membangun kepercayaan merupakan strategi manajemen yang tidak hanya berfokus pada saat ini saja tapi pada kerjasama selanjutnya atau dimasa yang akan datang. Membangun kepercayaan merupakan niat dan tujuan bersama dari pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua pihak-pihak yang terkait pada kerjasama. Dalam proses *collaborative governance* tidak lepas dengan membangun kepercayaan dari pihak yang melaksanakan kemitraan, tidak hanya itu saja namun juga perlu adanya kepercayaan dari pihak lain seperti masyarakat dan lembaga lainnya agar tidak menutup kemungkinan kedepannya pihak tersebut akan berkolaborasi.

3. Komitmen pada proses (*Comitment To Process*)

Proses *collaborative governance* harus disertai dengan komitmen yang kuat pada setiap prosesnya sehingga semua hal yang dibangun akan terlaksana dengan baik. Dalam menjalankan kolaborasi, diperlukan komitmen yang kuat bagi setiap pemangku kepentingan pada suatu proses kolaborasi. Kemitraan yang dilaksanakan oleh PLTU dan DLH mempunyai komitmen, bahwa antara pihak PLTU dan DLH memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing pada kemitraan pengelolaan sampah di TPA Parit Enam.

4. Pemahaman bersama (*Share Understanding*)

Share Understanding atau pemahaman bersama adalah mengetahui aturan, tujuan dan batasan pengejaran. Hal tersebut merupakan aturan yang diketahui oleh setiap aktor yang terlibat dalam kerja sama. Pada kolaborasi/kemitraan yang telah dilakukan melalui proses pemahaman bersama. Pemahaman bersama disini adalah kegiatan yang diturunkan dari hasil musyawarah, diskusi, rapat dan audiensi. Pemahaman bersama dalam menyatukan persepsi antara pemerintah dan perusahaan Negara harus berjalan sesuai dengan peraturan daerah. Memberi pemahaman yaitu sebagai misi dan tujuan yang jelas dan arah yang jelas dalam keberlangsungan sebuah kolaborasi.

5. Dampak sementara (*Intermediate Outcome*)

Intermediate outcome merupakan hasil sementara atau proses yang sedang berlangsung. Semua proses yang dilakukan dapat memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh seluruh pihak terkait. Hasil sementara dari perjanjian kerja sama antara PLTU dan DLH Kota Pangkalpinang dapat berproses dengan baik serta bernilai strategis. Kemitraan yang dilakukan oleh PLTU dan DLH dalam mengelola sampah di

TPA Parit Enam adalah rencana kerja sama yang baik karena bertujuan untuk membantu pemerintah kota dalam hal mengelola sampah menjadi nilai yang ekonomis, dapat dikelola dan digunakan kembali menjadi energi alternatif serta mengurangi jumlah volume sampah yang ada di TPA Parit Enam.

c. Leadership Fasilitatif (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kolaborasi pada pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan sangat diperlukan sehingga rencana strategis yang disusun dapat dicapai dalam satu konsensus kesepakatan dengan memperhatikan aspek kebersamaan, kepercayaan serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut ada dua proses yang mempengaruhi *Leadership* dalam *collaborative governance*.

a. Sarana dan prasarana

Collaborative Governance pada pengelolaan sampah yang dilakukan memerlukan sarana dan prasarana untuk dapat menunjang keberlangsungan proses agar dapat menjadikan pengelolaan sampah di TPA Parit Enam berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara kepada *manager Engineering* PLTU adalah sarana dan prasarana yang diberikan PLTU berupa mesin pencacahan sampah, mesin pengeringan, yang disertai aerasi yang digunakan untuk mengurangi kadar air dalam sampah, kendaraan sebagai transportasi pengangkut sampah, serta tempat pemilahan sampah. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu dalam kolaborasi pengelolaan sampah sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

b. Kebijakan pemimpin

Kebijakan pemimpin dalam *collaborative governance* diterapkan oleh para pemangku kepentingan yang terkait. Pengaruh seorang pemimpin dalam hal membentuk kebijakan merupakan sesuatu yang penting untuk keberlangsungan kolaborasi. Pada proses ini kebijakan dalam hal menjalankan kemitraan oleh PLTU dan DLH dapat memberikan pengaruh besar karena bertujuan membantu pemerintah kota dalam hal permasalahan sampah di TPA Parit Enam yang belum dikelola baik. Peran pemerintah kota Pangkalpinang juga khususnya peran pemimpin seperti walikota sangat dirasa memberi pengaruh besar terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dalam hal penanggulan dan pengelolaan sampah sehingga dapat bernilai ekonomis serta memungkinkan kedepannya untuk membuka wadah pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menambah pemasukan rumah tangga dan daerah.

d. Organization Design (Desain Organisasi/Kelembagaan)

Desain organisasi dalam konteks tata kelola kolaborasi pada pengelolaan sampah merupakan dimensi keempat yang menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah sistem yang didesain dengan banyak actor atau pelaku yang terlibat dan dapat dikatakan *multi-stakeholder*, baik PLTU, DLH, pengelola TPA Parit Enam serta instansi pendukung seperti BAPEDA, BAKUDA, dan PU.

Dalam pelaksanaan kolaborasi/kemitraan dapat dinilai perbedaan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh PLTU dan DLH. Saat menjalin kemitraan lain sejauh mana wewenang yang dibagi tersebut dapat menghasilkan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dianalisis dari

perspektif proses tata kelola kolaboratif dan implementasi. Pada perspektif proses, sebuah kebijakan yang dikatakan berhasil jika seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan kebijakan sedangkan perspektif hasil tata kelola kolaboratif melihat bahwa keberhasilan kebijakan dapat diketahui dari kesesuaian tujuan program dengan dampak kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam kebijakan publik.

Adannya *MoU* pada kolaborasi/kemitraan yang dilaksanakan PLTU dan DLH mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan mulai dari pihak DLH selaku sebagai pihak pengelola TPA Parit Enam, Kepala Lurah Kelurahan Bacang, masyarakat dan Intansi dinas pendukung seperti BAPEDA, BAKUDA dan PU. Bentuk kerjasama antar *stakeholder* yang melibatkan pemerintah kota, Perusahaan Negara dan masyarakat yang diartikan sebagai *collaborative governance*. Kolaborasi dalam pengelolaan sampah di TPA Parit Enam mengutamakan interaksi dan kompromi dari berbagai aktor yang terlibat baik individu, kelompok, organisasi atau lembaga baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat menerima dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif pada *collaborative governance* pengelolaan sampah di TPA Parit Enam Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *collaborative governance* (Studi tentang pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Parit Enam Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalin kolaborasi antara PLTU dan DLH dalam pengelolaan sampah di TPA Parit Enam dianggap efektif. Ini dibuktikan oleh pihak DLH yang mampu memenuhi standard program kerja yang diajukan PLTU. Selain itu adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait juga diharapkan tidak mendapat kendala apapun. Sementara untuk beberapa ruas alternatif masih terdapat beberapa titik sampah yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Sinergi antara PLTU, DLH dan pengelola TPA serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Pihak PLTU dan DLH juga membangun komunikasi yang baik dalam tugas dan fungsi kerja masing-masing. Diharapkan kepada masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam program kota bersih yang direncanakan oleh PLTU dan DLH sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman dirasakan oleh masyarakat. *Collaborative governance* pada pengelolaan sampah di TPA Parit Enam antara Pihak Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang diharapkan dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat berkelanjutan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Basuki, A. S. (2006). *Penguatan pemerintahan desa berbasis good governance*, Universitas Brainwijaya, Malang.
- Ibrahim, I. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Bustami, R. & Ibrahim, I. (2009). *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi dan Manajemen (prilaku, struktur, budaya dan perubahan organisasi)*. alfabeta. Bandung.
- Marshall, & Farahbakhsh, K. (2013). *Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries Waste Management*. School of Engineering, University of Guelph, Thrombrough building. Canada.
- Pangkalpinang.kota.bps.go.id. (2022). *Kota Pangkalpinang dalam angka 2022*. Diakses pada Senin 20 Juni 2022 : 18.30.

Tentang Penulis

Krisnawati, Penulis merupakan mahasiswa Sarjana (S1) di Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi di jurusan tersebut.